

# Matriks Perubahan Renstra Inspektorat Provinsi 2013-2018

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN		
<b>MENJADI LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL DAN RESPONSIF UNTUK TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>	<b>MENDORONG PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</b>	<b>Nilai EKPPD Pemerintah Prov Sulsel</b>	<b>Pembinaan kepada SKPD maupun kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerja</b>	<b>Meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan kepada SKPD Provinsi maupun kabupaten/Kota</b>		
				<b>Jumlah Pemerintah Kab/Kota di Prov Sulsel yang Nilai EKPPD Tinggi dan sangat Tinggi</b>				
			<b>Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.</b>				
				<b>Jumlah SKPD Prov. SulSel dengan Nilai akuntabilitas kinerja &gt;65</b>				
					<b>Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik</b>	<b>Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material</b>	<b>Pembinaan kepada SKPD dengan mengedepankan fungsi konsultansi dan penjaminan mutu serta berupaya melakukan pencegahan secara dini terhadap terjadinya penyimpangan</b>	<b>Meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan kepada SKPD</b>
					<b>Opini BPK atas LKPD Prov Sulsel</b>			
			<b>Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK</b>	<b>% Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK pada setiap tahun berkenaan</b>				
			<b>Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Bersih Melayani</b>	<b>Jumlah Unit Kerja Pelayanan yang memenuhi persyaratan sebagai Wilayah Bebas Korupsi</b>				

# Matriks Perubahan Renstra Inspektorat Provinsi 2013-2018

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN
	<b>MENDORONG PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>MASYARAKAT BERPERAN SERTA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat</b>	% Penyelesaian Penanganan Kasus Penyalagunaan Wewenang	<b>Meningkatkan sikap responsif Aparat pengawasan terhadap lingkungan yang berpengaruh termasuk peran serta masyarakat terhadap pengawasan pelayanan publik dan kegiatan pembangunan serta membuka ruang dan saluran partisipasi masyarakat</b>	<b>Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik</b>
				% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat		
				% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai		
	<b>MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENGAWASAN, TATA LAKSANA DAN KELEMBAGAAN PENGAWASAN</b>	<b>MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENGAWASAN, TATA LAKSANA DAN KELEMBAGAAN PENGAWASAN</b>	<b>Meningkatnya kompetensi , disiplin dan etika Aparat pengawasan</b>	% Pejabat fungsional yang bersertifikasi	<b>Meningkatkan kompetensi , disiplin dan etika aparat pengawasan untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung peningkatan kualitas hasil pengawasan dan pembinaan.</b>	<b>Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme aparat pengawasan</b>
				% Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik		
				% Aparat pengawasan yang tidak melanggar Disiplin PNS		
		<b>Tatalaksana pengawasan yang sinergi dan terkordinasi</b>	% Kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	<b>Pengawasan dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan</b>	<b>Mengkordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Prov. Sulsel</b>	

